BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemberian Suara Penyandang Disabilitas Pada Pemilihn Gubernur Jawa Barat Tahun 2013

Pemberian suara yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas Kota Bandung pada pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat tahun 2013. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara mendatangi tangsung tempat pemungutan suara (TPS) tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Tahap pemungutan/pengambilan suara merupakan puncak dalam kegiatan pemilihan gubernur Jawa Barat, pada saat inilah masyarakat akan mendatangi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disediakan untuk menyalurkan suaranya, dengan memilih salah satu calon gubernur dan wakil gubernur yang ditawarkan oleh partai-partai yang menjadi koalisi dalam pilgub Jawa Barat. Kedatangan penyandang disabilitas ke TPS merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang paling sederhana yang dapat dilakukan penyandang disabilitas yang telah memenuhi persyaratan sebagai daftar pemilih tetap. Tinggi ataupun rendahnya tingkat partisipasi penyandang disabilitas dapat dilihat dari seberapa besar jumlah pemilih yang memberikan suara pada pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat tahun 2013.

Pemberian suara yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di Kota Bandung dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Barat tahun 2013 dapat terlihat pada proses pemberian suara. Pertama dalam proses pemberian suara penyandang disabilitas tidak dibedakan dengan masyarakat biasa dari prosedur maupun yang lainnya, adapun proses pemberian suara, pertama pemilih yaitu penyandang cacat fisik baik tuna netra, tuna daksa dan tuna rungu datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan langsung menerima surat suara.

Setelah mendapatkan surat suara pemilih memasuki bilik suara untuk melakukan pencoblosan pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jawa Barat periode 2013 – 2018. Setelah melakukan pencoblosan pemilih memperlihatkan kepada panitia pemungutan suara (PPS) untuk memastikan bahwa surat suara sudah terlipat dengan benar kemudian memasukan surat suara ke dalam kotak suara. Proses yang terakhir adalah pemilih mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang telah disediakan untuk bukti bahwa pemilih telah memberikan hak suaranya dan hal ini dilakukan untuk menghindari apabila ada yang memberikan suara atau melakukan pencoblosan lebih dari satu kali.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan dengan informan para penyandang disabilitas di Kota Bandung, semua penyandang disabilitas turut serta berpartisipasi memberikan suara/ hak pilihnya dalam pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat tahun 2013. Semua penyandang disabilitas mempunyai kesadaran politik bahwa selain mempunyai hak untuk memberikan suara, penyandang disabilitas juga menyadari

kewajiban sebagai warga Negara Indonesia yang baik harus bisa mengambil sikap dengan cara turut berperan dalam menentukan pemimpin.

Selain itu meskipun ke lima pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) dinilai penyandang disabilitas mempromosikan program yang kurang memperhatikan penyandang disabilitas tetapi penyandang disabilitas tetap memilih untuk memberikan suara dari pada golongan putih (golput) dengan harapan siapa pun yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur dapat mewakili aspirasi dan dapat memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

Kesadaran penyandang disabilitas untuk memberikan suara pada pemilihan umum (pemilu) sudah cukup baik, tetapi hal ini belum ditunjang dengan pendataan yang jelas dari pihak komisi pemilihan umum (KPU) maupun panitia pemungutan suara (PPS). Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyandang cacat fisik mengaktakan bahwa pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat pada tanggal 22 Pebruari 2013 merupakan pertama kalinya ikut dalam pemilihan umum (pemilu). Usianya saat ini 37 tahun dan sangat disayangkan sekali baru mengikuti pencoblosan satu kali. Menurutnya penyebab tidak mengikuti pemilu bukan karena tidak ingin, tetapi ia tidak memilih karena sebelumnya tidak pernah terdaftar oleh panitia pemungutan suara (PPS). Setelah lama tidak terdaftar sebagi pemilih, pada tahun 2013 akhirnya terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat tahun 2013.

Masalah tersebut mungkin akan dapat teratasi apabila pendataan daftar pemilih penyandang disabilitas lebih di tingkatkan. Karena berdasarkan hasil

observasi dilapangan di komisi pemilihan umum (KPU) Kota Bandung dan KPU Jawa Barat tidak tersedia data mengenai jumlah pemilih penyandang disabilitas di Kota Bandung. Karena data yang masuk tidak dibedakan antara masyarakat normal dan masyarakat penyandang disabilitas. Sehingga jumlah penyandang disabilitas yang memberikan suara pada pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat tahun 2013 tidak dapat diketahui dengan pasti.

Berdasarkan uraian diatas partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pemberian suara pada pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat tahun 2013 dapat dikatakan cukup baik dilihat dari seluruh informan penyandang disabilitas yang melaksanakan proses pemberian suara karena merasa mempunyai tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan untuk memilih pemimpin.

Kedua, Sub indikator dalam pemberian suara pada pemilihan kepala daerah (Pilgub Jabar) 2013 yaitu mengikuti sosialisasi. Sosialisasi yang diikuti oleh penyandang disabilitas diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum (KPU) Kota Bandung yang bekerjasama dengan persatuan penyandang cacat Indonesia (PPCI) Kota Bandung. Sosialisasi dilaksanakan di 2 (dua) tempat yaitu : di salah satu hotel di Jl. Soekarno-Hatta No. 425 A Bandung pada hari jumat 21 Desember 2012 dan di Gedung Wyata Guna yang berlokasi di Jl. Padjajaran No. 52 Bandung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua persatuan penyandang cacat Indonesia (PPCI) Kota Bandung Sosialisasi dilaksanakan 2 kali. Sosialisasi pertama dilaksanakan di hotel merupakan sosialisasi awal dan hanya di ikuti oleh penyandang disabilitas tuna daksa saja Karen sosialisasi tidak hanya diikuti oleh penyandang

disabilitas tetapi juga di hadiri oleh 100 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bandung dan dijelaskan langsung oleh pihak KPU Kota Bandung. Sementara itu penyandang disabilitas kategori tuna netra dan tuna rungu mengikuti sosialisasi di Gedung Wyata Guna karena dapat mudah diakses oleh tuna netra dan tuna rungu. Selain itu sosialisasi kepada tuna netra dan tuna rungu dijelaskan oleh pihak persatuan penyandang cacat Indonesia (PPCI) Kota Bandung.

Dalam sosialisasi juga dilakukan simulasi dalam proses pemberian suara. Simulasi dilakukan untuk membantu mempermudah penyandang disabilitas melakukan pemberian suara pada pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat tahun 2013. Dalam proses sosialisasi penyandang disabilitas cukup antusias seperti terlihat pada gambar 3.5 halaman 60 penyandang disabilitas terlihat serius dalam memperhatikan tata cara pemberian yang disampaikan oleh narasumber.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyandang tuna netra dalam sosialisasi untuk pemberian suara dalam pemilihan umum tidak ada kesulitan karena sebelumnya sudah mempunyai pengalaman mengikuti pemilihan umum (pemilu). Sehingga dalam sosialisasi para penyandang tuna netra sangat mudah mengerti tata cara dalam pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat tahun 2013. Sosialisasi selain dijelaskan secara lisan juga dilakukan simulasi yaitu : pihak komisi pemilihan umum (KPU) Kota Bandung mengajak perwakilan dari tuna netra untuk mencoba/mempraktekan tata cara pilgub mulai dari proses awal mendatangi tempat pemungutan suara, sampai pada tahap memasukan surat suara pada kotak suara.

Berbeda dengan tuna netra, bentuk sosialisasi bagi tuna rungu dibantu oleh penerjemah khusus yang mengerti bahasa isyarat. Karena penyandang tuna rungu tidak bisa bicara dan mengalami gangguan pendengaran. Penerjemah yang mensosialisasikan tata cara pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat than 2013 adalah ketua persatuan penyandang cacat Indonesia (PPCI) Kota Bandung. Sosialisasi ia lakukan karena dari pihak komisi pemilihan umum (KPU) baik KPU Kota Bandung maupun KPU Jawa Barat tidak ada yang bisa dan tidak ada yang mengerti bahasa isyarat. Meskipun demikian sosialisasi tetap diselenggaraan oleh komisi pemilihan umum (KPU) Kota Bandung bekerjasama dengan persatuan penyandang cacat Indonesia (PPCI) Kota Bandung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris persatuan penyandang cacat Indonesia (PPCI) Kota Bandung sekaligus penyandang tuna daksa dapat dikatakan bahwa sosialisasi bagi tuna daksa dapat dikatakan lancar. Sosialisasi yang diselenggarakan komisi pemilihan umum (KPU) Kota Bandung bekerjasama dengan persatuan penyandang cacat Indonesia (PPCI) Kota Bandung sudah cukup baik. Tetapi sosialisasi yang disampaikan hanya sosialisasi dalam proses pemberian suara saja. Sedangkan sosialisasi mengenai visi dan misi, program serta profil calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) tidak disosialisasikan.

Sosialisasi pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) penting dilakukan untuk menarik simpati masyarakat. Tetapi sosialisasi tidak bisa di,engerti oleh semua lapisan masyarakat karena sosialisasi yang dilakukan pihak calon hanya dari media masa, elektronik, audio dan visual. Sedangkan

masyarakat khusunya penyandang disabilitas mempunyai keterbatasan fisik yang berbeda-beda. Akibatnya pemahaman masing-masing kategori penyandang disabilitas terhadap pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) mengalami kesulitan yang berbeda-beda.

Kesulitan yang dihapai oleh tuna netra adalah sosialiasi foto calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) tidak tersedia dalam huruf *braille*, tetapi yang disosialisasikan hanya dapat dilihat oleh masyarakat yang dapat melihat saja, karena foto, profil dan visi misi hanya terdapat pada spanduk, poster, baligho maupun pamflet tidak ada yang dicetak dalam huruf *braille* sehinga tidak bisa dilihat oleh penyandang tuna netra.

Sementara itu kesulitan yang dihadapi oleh penyandang tuna rungu yaitu tidak adanya sosialisasi calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) yang disampaikan menggunakan bahasa isyarat. Tidak adanya penjelasan profil, visi misi dan program menyulitkan penyandang tuna rungu untuk mengenali calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jawa Barat tahun 2013.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyandang tuna rungu lebih sulit berkomunikasi disebabkan gangguan pendengaran dan tidak bisa berbicara. Bahkan bagi tuna rungu yang terlahir dari orang tua yang mengalami cacat fisik kategori tuna netra mereka tidak bisa berkomunikasi , adapun komunikasi yang dilakukan yaitu dengan kontak fisik secara langsung.

Berdasarkan uraian diatas dapatdikatakan bahwa tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam mengikuti sosialisasi dapat dikatakan cukup baik

dilihat dari kehadiran penyandang disabilitas saat sosialisasi dan keseriusan penyandang disabilitas dalam memperhatikan sosialisasi. Meskipun sosialisasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tidak bisa di pahami oleh semua penyandang disabilitas penderita cacat fisik, tetapi sosialisasi yang dilselenggarakan komisi pemilihan umum (KPU) Kota Bandung yang bekerjasama dengan persatuan penyandang cacat Indonesia (PPCI) Kota Bandung dapat diikuti dengan baik oleh penyandang tuna daksa, tuna netra dan tuna rungu.

Ketiga, sub indikator dalam pemberian suara pada pemilihan kepala daerah (Pilgub Jabar) 2013 yaitu kendala. Kendala yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam berpartisipasi politik, khususnya dalam pemberian suara pada pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat tahun 2013. Kendala yang dihadapi berbeda-beda sesuai dengan kondisi fisik penyandang disabilitas, karena dengan kondisi fisik yang berbeda akan mempengaruhi kendala yang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua persatuan penyandang cacat Indonesia (PPCI) Kota Bandung sekaligus penyandang disabilitas kategori tuna daksa yang menggunakan kursi roda dapat diketahui bahwa bagi tuna daksa yang menggunkana kursi roda kendala yang dihadapi meliputi : pertama akses / jalan menuju tempat pemungutan suara (TPS) belum dapat diakses dengan baik. Kondisi jalan menuju bilik suara terdapat tangga dan struktur tanah yang tidak rata.

Kondisi ini menjadi kendala yang serius bagi pengguna kursi roda karena dengan kondisi jalan yang bertangga dan tidak rata menyebabkan pengguna kursi roda harus dibantu / dibopong untun memasuki bilik suara. Hal tersebut

menyebabkan pengguna kursi roda tidak dapat mandiri dan harus tergantung kepada orang lain. Selain itu pengguna kursi roda kesulitan dalam memasuki bilik suara , karena bilik suara yang ada tidak cukup untuk ukuran kursi roda yang lebar. Hal ini sangat mengganggu kenyamanan pengguna kursi roda seperti yang terlihat pada gambar 3.6 pada halaman 59 bagian belakang kursi roda berada pada bilik suara yang lain.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang didatangi oleh informan penyandang disabilitas belum ada yang memenuhi atau dirancang khusus bagi penyandang disabilitas tuna daksa dan tuna netra. Penyandang disabilitas sangat berharap untuk pemilihan umum (pemilu) selanjutnya, aka nada tempat pemungutan suara (TPS) khusus bagi pengguna kursi roda dan tuna netra. Tempat tersebut harus dapat diakses oleh kursi roda dan tuna netra seperi : jalanan yang rata, dan tidak terdapat anak tangga.

Dengan adanya tempat pemungutan suara (TPS) khusus bukan berarti penyandang disabilitas ingin dibedakan, tetapi agar penyandang disabilitas khususnya pengguna kursi roda dan tuna netra bisa melakukan pemberian suara tanpa harus dibantu bahkan harus di angkat oleh orang lain. Karena para penyandang disabilitas di Kota Bandung ingin mandiri dan tidak ingin tergantung kepada orang lain.

Berdasarkan uraian diatas kendala yang dihadapi penyandang disabilitas Kota Bandung dalam pemberian suara pada pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat tahun 2013 cukup banyak, dilihat dari kondisi tempat pemungutan suara (TPS) yang belum mampu memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas khususnya bagi tuna daksa yang

menggunakan kursi roda dan bagi tuna netra karena masih terdapat anak tangga dan jalan menuju bilik suara yang tidak rata serta bilik suara yang kurang luas menyebabkan kursi roda harus memasuki dua bilik suara sekaligus.

Keempat, sub indikator dalam pemberian suara pada pemilihan kepala daerah (Pilgub Jabar) 2013 yaitu fasilitas khusus . Fasilitas kuhusu merupakan sarana prasaran yang disediakan pihak panitia pemungutan suara (PPS) untuk membantu penyandang disabilitas di Kota Bandung. Fasilitas tersebut disediakan dengan tujuan mempermudah penyandang disabilitas dalam memberikan suara pada pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat tahun 2013.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyandang tuna netra dapat diketahui bahwa dalam pemberian suara pihak penyelenggara panitia pemungutan suara (PPS) menyediakan panitia khusus untuk membantu tuna netra dalam memberikan suara pada pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat tahun 2013. Bentuk bantuan bagi tuna netra meliputi : mengantarkan tuna netra menuju tempat pengambilan surat suara, memasuki bilik suara, membantu memasukan surat suara ke dalam kotak suara samapi dengan mencelupkan salah satu jari pada tinta yang telah disediakan.

Menurut salah satu tuna netra hal tersebut sangat membantu penyandang tuna netra dalam memberikan suara pada pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat tahun 2013. Meskipun petugas panitia pemunguntan suara (PPS) ikut masuk ke dalam bilik suara tetapi hal tersebut tidak menjadi gangguan bagi tuna netra. Karena petugas khusus yang disediakan khusus bagi penyandang disabilitas khususnya tuna netra telah disumpah untuk merealisasikan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil

(jurdil). Sehingga penyandang tuna netra percaya bahwa petugas khusus yang membantu akan menjamin kerahasiaan calon gubernur (cagub) yang dipilih oleh tuna netra.

Selain petugas untuk membantu tuna netra juga mendapatkan fasilitas khusus berupa *template* (surat suara *braille*). *Template* ini dibuat khusus untuk membantu penyandang tuna netra dalam memilih calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jawa Barat tahun 2013. *Template* ini merupakan surat suara yang dicetak dengan menggunakan huruf *braille* dan terdapat nama calon dan no urut pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jawa Barat tahun 2013.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas Kota Bandung dapat dikatakan cukup baik dilihat dari tersedianyan petugas khusus dan tersedianya *template* atau surat suara *braille* untuk membantu penyandang tuna netra dalam pemberian suara pada pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat tahun 2013.

Berdasarkan hasil observasi dan uraian diatas partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemeberian suara pada pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat dapat dikatakn cukup baik. Tetapi jika dilihat dari tingkat partisipasi politik yang dikemukakan Almond peberian suara merupakan tingkatan partisipasi politik yang paling rendah, sehingga bisa saja dikatakan belum cukup baik. Tetapi jika ada teori khusus partisipasi politik bagi penyandang disabilitas mungkin saja pemberian suara

bisa menjadi sangat baik dilihat dari keinginan penyandang disabilitas yag mempunyai keterbatasan fisik tetapi tetap berusaha memberikan suaranya.

4.2 Keikutsertaan Penyandang Disabilitas Dalam Rapat Umum

Rapat umum adalah kegaiatn yang dilakukan penyandang disabilitas Kota Bandung disuatu tempat guna membahas masalah-masalah maupun mengajukan kebijakan yang berhubungan dengan masalah disabilitas kepada pemerintah. Dalam perumusan kebijakan penyandang disabilitas mempunyai hak untuk berpendapat dan memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada penyandang disabilitas Kota Bandung, rapat umum meliputi : diskusi formal ditingkat Kota Madya, diskusi formal ditingkat Provinsi dan Lokasi.

Sub Indikator pertama dari rapat umum yaitu menghadiri diskusi formal ditingkat Kota Madya. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa penyandang disabilitas dilibatkan dalam diskusi formal bahkan dilibatkan dalam perumusan dan pembuatan kebijakan peraturan daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat. Penyandang disabilitas Kota Bandung berusaha memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Hal ini dapat diketahui dari partisipasi dalam mengikuti diskusi formal ditingkat Kota Bandung hingga dibuatnya perda disabilitas di Kota Bandung.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan tidak semua penyandang disabilitas pernah mengikuti diskusi formal, karena berdasarkan hasil wawancara dengan Rian penyandang tuna rungu dapat diketahui bahwa tidak pernah mengikuti diskusi formal

ditingkat Kota Bandung. Faktor penyebab tidak mengikuti diskusi formal di tingat Kota Bandung akibat keterbatasan fisik yang tidak bisa berbicara dan kurang memahami bahasa selain bahasa isyarat. Karena dalam setiap diskusi formal pemerintah Kota Bandung tidak menghadirkan penterjemah bagi penyandang tuna rungu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyandang tuna netra dapat diakatakan bahwa tuna netra cukup sering mengikuti diskusi formal di tingkat Kota Bandung, tetapi dengan bentuk audensi. Audensi biasa diselenggarakan oleh Dinas sosial, Dinas Bina Marga, DPRD Kota Bandung dan komisi pemilihan umum (KPU) Kota Bandung. Dalam audensi materi yang dibahas mengenai masalah pemberdayaan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung, penyandang tuna netra diberi kesempatan untuk melakukan tanya jawab dan mengajukan pendapat.

Dinas Sosial Kota Bandung sebagai organisasi yang berwenang mengurus dan menangani masalah sosial di Kota Bandung mempunyai peranan penting dalam membina dan melindungi penyandang disabilitas di Kota Bandung. Karena penyandang disabilitas termasuk kedalam masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sehingga harus mendapatkan perhatian khusus. Sama halnya dengan Dinas Sosial, Dinas Perhhubungan juga harus memperhatikan kepentingan penyandang disabilitas sperti : menyediakan fasilitas umum angkutan umum jembatan penyebrangan, dan trotoar khusus bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung.

Hasil diskusi bersama komisi pemilihan umum (KPU) Kota Bandung akhirnya disediakannya *template* (surat suara *braille)* bagi tuna netra. Gagasan untuk membuat *template* bagi tuna netra di Kota Bandung pertamakali disampaikan Djumono kepada pihak komisi pemilihan umum (KPU) Kota Bandung. Sampai akhirnya pada tahun 2004 pertamakalinya pemilih tuna netra di Kota Bandung melakukan pemilihan dengan menggunakan *template.*

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas Kota Bandung dalam menghadiri diskusi formal ditingkat Kota dapat dikatakan cukup baik. Meskipun dilihat dari keikutsertaan, penyandang tuna rungu tidak pernah menghadiri diskusi formal tetapi penyandang tuna daksa dan tuna netra pernah menghadiri diskusi formal di tingkat Kota Bandung.

Sub indikator kedua yaitu menghadiri diskusi formal ditingkat Provinsi. Diskusi formal di tingkat provinsi yaitu : kegaiatn yang dilakukan penyandang disabilitas Kota Bandung disuatu tempat guna membahas masalah-masalah maupun mengajukan kebijakan yang berhubungan dengan masalah disabilitas kepada pemerintah provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa penyandang cacat indonesia (PPCI) Kota Bandung cukup sering melakukan diskusi formal ditingkat provinsi. Pengurus penyandang cacat indonesia (PPCI) Kota Bandung melakukan audensi 2 kali dalam satu tahun. Dalam audensi penyandang disabilitas mengajukan peraturan daerah untuk perlindungan penyandang disabilitas.

Pengajuan peraturan daerah sudah diajukan penyandang cacat indonesia (PPCI) Kota Bandung kepada pemerintah provinsi Jawa Barat sejak tahun 2001. Hingga pada tahun 2006 baru disahkan peraturan daerah provinsi Jawa Barat nomor 10 tahun 2006 tentang penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat.

Seperti halnya diskusi ditingkat Kota Bandung, diskusi formal ditingkat provinsi juga diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Dinas Bina Marga, DPRD Jawa Barat dan komisi pemilihan umum (KPU) Jawa Barat dengan membahas masalah yang berhubungan dengan penyandang disabilitas, dengan waktu selama 3 jam. Selain membahas rancangan undang-undang mengenai masalah disabilitas, pengurus persatuan penyandang cacat Indonesia (PPCI) Kota Bandung juga mengevaluasi kinerja pemerintah. Salah satu bentuk evaluasi Djumono pernah menegur salah satu anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Jawa Barat karena tidak mengetahui ada peraturan daerah tentang perlindungan penyandang disabilitas di Jawa Barat.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat diketahui seperti halnya diskusi formal di tingkat Kota, diskusi formal ditingkat provinsi juga belum pernah dihadiri oleh penyandang tuna rungu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sutarjo penyandang tuna rungu dapat diketahui bahwa tuna rungu tidak pernah menghadiri diskusi formal karena tidak ada penterjemah khusus bagi tuna rungu yang menggunakan bahasa isyarat. Sehingga diskusi formal hanya pernah dihadiri oleh penyandang tuna daksa dan tuna netra.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas Kota Bandung dalam menghadiri rapat umu ditingkap provinsi dapat dikatan sudah cukup baik. Dilihat dari sepuluh informan hanya tiga informan yang belum pernah menghadiri rapat umum, karena keterbatasan dalam masalah komunikasi.

Sub indikator yang terakhir dari menghadiri rapat umum yaitu lokasi. Lokasi adalah tempat dilaksanakannya diskusi politik baik di tingkat Kota Bandung maupun tingkat provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil observasi dilapangna lokasi diskusi formal tingkat Kota dilaksanakan di Dinas sosial Kota Bandung yang berlokasi di Jl.Sindangsirna No. 42 – Bandung , Dinas Bina Marga yang berlokasi di Jl. Cianjur No.34 - Bandung, Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bandung yang berlokasi di Jl. Wastukencana No.2 Bandung dan Komisi Pemiliha Umum (KPU) Kota Bandung yang berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta No.12 Bandung. Untuk lokasi sosialisasi bersama KPU Kota Bandung diselnggarakan di Hotel di J. Soekarno Hatta.

Seperti diskusi formal ditingkat Kota, diskusi formal ditingkat provinsi juga dilaksanakan di Dinas Sosial provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jl. Raya Cibabat No.331 Cimahi, gedung Dewan Perwakilan Daerah provinsi Jawa Barat (DPRD) yang berlokasi di Jl. Diponegoro No. 22 Bandung, Kantor komisi pemilihan umum (KPU) Jawa Barat yang berlokasi di Jl. Garut No. 11 Bandung. Seluruh lokasi tersebut mudah diakses oleh penyandang disabilitas kalena lokasinya berada di pinggir jalan raya. Penyandang disabilitas tuna daksa datang menggunakan motor

khusus yang sudah di modifikasi yang biasa disebut modif singkatan dari motor difabel.

Modif atau motor difabel dirakit khusus oleh penyandang tuna daksa yang tidak mempunyai kaki karena sepeda motor biasa tidak bisa digunakan sebagai kendaraan. Berdasrkan hasil wawancara dengan salah satu penyandang tuna daksa dapat diketahui bahwa keberadaan modif sangat membantu tetapi untuk mengurus surat ijin mengemudi itu sulit, sehingga kami harus menghindari razia karena tidak punya surat ijin mengemudi (SIM), Beruntung selama menuju lokasi diskusi formal belum pernah terkena tilang.

Berdasarkan hasil uraian diatas dapat diketahui bahwa lokasi penyelenggaraan diskusi formal ditingkat Kota maupun provinsi dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas dengan menggunakan motor khusus yang disebut modif singkatan dari motor difabel. Selain itu lokasi penyelanggaraan juga strategis karena masih berada di pusat Kota.

4.3 Kegiatan Berhubungan Dengan Pejabat Pemerintah Dari Penyandang Disabilitas

Partisipasi penyandang disabilitas dalam melakukan hubungan dengan pejabat pemerintahan dapat dilihat dari : Pertama komunikasi antara penyandang disabilitas dengan pejabat pemerintah. Komunikasi yang dilakukan dilaksanakan secara persuasive dengan cara berinteraksi secara langsung.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua persatuan poenyandang cacat Indonesia (PPCI) Kota Bandung dapat diketahui bahwa komunikasi penyandang disabilitas dengan pejabat pemerintah salah satunya terjadi karena ada hubungan kekerabatan antara penyandang disabilitas dengan salah pejabat pemerintah yaitu mantan wakil gubernur (wagub) Jawa Barata periode 2009 – 2013 ketika masih menjabat sebagai wakil gubernur (wagub) Jawa Barat cukup sering mendatangi persatuan penyandang cacat Indonesia (PPCI) Kota Bandung karena sekretarian PPCI Kota Bandung menyatu dengan badan pembina olahraga cacat (BPOC) Kota Bandung.

Selain mempunyai hubungan baik dengan pejabat pemerintah penyandang disabilitas juga pernah beberapa kali bertemu dengan Gubernur Jawa Barat apabila ada acara-acara yang berhubungan dengan penyandang disabilitas di Kota Bandung. Selain untuk membahas masalah yang berhubungan dengan disabilitas, komunikasi juga dilakukan saat hari-hari besar seperti idul fitri dan hari – hari besar Nasional seperti hari ulang tahun Republik Indonesia (HUT-RI) setiap tanggal 17 Agustus..

Berdasarkan hasil observasi dilapangan tidak semua penyandang disabilitas pernah berkomunikasi dengan pejabat pemerintah. Dari sepuluh informan penyandang disabilitas hanya 3 orang yang pernah berkomunikasi langsung dengan pejabat Pemerintah yaitu : Ketua PPCI Kota Bandung, Ketua Dewan Pertimbangan PPCI Jawa Barat dan Sekretaris PPCI Kota Bandung. Sementara itu tujuh dari informan yaitu : 2 orang tuna netra, 2 orang tuna daksa dan 3 orang tuna rungu mengatakan belum pernah berkomunikasi secara langsung dengan pejabat pemerintah.

Perbedaan tersebut terjadi karena pengurus PPCI cukup aktif dan berperan peting dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Bandung. Selain itu ketiganya merupakan Ketua dan pengurus di persatuan penyandang cacat Indonesia (PPCI) Kota Bandung sehingga setiap pejabat pemerintahan yang akan melakukan kontak dengan penyandang disabilitas di Kota Bandung pasti akan berkoordinasi dengan Djumono, Riki maupun Rasikin.

Berdasrkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas dalam berkomunikasi dengan pejabat pemerintah dapat dikatakan belum cukup baik. Dilihat dari 10 informan penyandang disabilitas, hanya 3 informan yang pernah berkomunikasi dengan pejabat pemerintahan, sedangkan 7 informan lainnya mengatakan belum pernah melakukan komunikasi dengan pejabat pemerintah.

Kedua, sub indikator dari mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintahan yaitu tim sukses yaitu dukungan yang diberikan oleh penyandang disabilitas Kota Bandung kepada pejabat pemerintah untuk memperoleh kekuasaan / memenangkan pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat tahun 2013. Tim sukses sangat penting dalam pemilihan (pilgub) Jawa Barat tahun 2013 karena dapat membantu dalam meningkatkan hasil perolehan suara bahkan bisa memenangkan pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyandang tuna rungu mengatakan bahwa dirinya belum pernah menjadi tim sukses bagi siapa pun. Dalam (pilgub) Jawa Barat tahun 2013 juga tidak ada yang menjadi tim sukses dari salah satu calon karena dianggap kelima pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jawa Barat periode 2013-2018 yaitu : Dikdik Mulyana Arief Mansur-Cecep Nana Suryana Toyib, Irianto MS Syafiuddin-Tatang Farhanul, Dede Yusuf-Lex Laksamana, Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar dan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki. Kelima pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernu (cawagub) tersebut tidak ada yang meminta dukungan khusus ataupun melakukan pendekatan kepada penyandang disabilitas Kota Bandung untuk mendukung memberikan suara dalam pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat tahun 2013.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat diketahui bahwa dalam pemilihan gubernur Jawa Barat yang dilaksanakan tanggal 24 Pebruari 2013 lalu masih mempunyai kekurangan dalam hal mempromosikan atau memperkenalkan masing-masing calon. Dapat diketahui juga bahwa profil yaitu asal-usul dan latar

belakang keluarga,pendidikan,prestasi,karir serta rencana program kerja calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat seperti visi dan misi, kebijakan yang akan dibuat jika terpilih turut menentukan simpati penyandang disabilitas di Kota Bandung untu mendukung pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jawa Barat periode 2013-2018.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyandang tuna daksa mengatakan dirinya tidak pernah dan tidak berminat untuk menjadi tim sukses dalam pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat kemarin karena menurutnya dalam menyampaikan visi dan misi serta mempromosikan program kerja seluruh pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) periode 2013-2018 tidak ada yang mempunyai program khusus bagi kesejahteraan maupun berpihak pada penyandang disabilitas. Sehingga Andre tidak berminat untuk menjadi tim sukses.

Tetapi meskipun dalam pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat tahun 2013 tidak menjadi tim sukses, tetapi sekarang tengah menjadi salah satu tim sukses ketua persatuan penyandang cacat Indonesia (PPCI) Kota Bandung yang saat ini telah mendaftarkan diri ke komisi pemilihan umum (KPU) Jawa Barat untuk mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif (caleg) sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari perwakilan Jawa Barat pada 2014.

Berdasarkan hasil wawancara dengan calon legislatif penyandang disabilitas mengatakan dirinya telah mendapatkan dukungan sebanyak 5.200 suara yang didapatnya dari 19 kota kabupaten di Jawa Barat. Diakuinya, 70 persen dari 5.200 suara dukungan tersebut berasal dari kaum penyandang disabilitas. Dukungan paling

banyak di Bandung, Garut, Ciamis, dan Bekasi. Tujuh puluh persen dukungan dari kaum disabilitas, termasuk dari keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat diketahui bahwa tidak terlibatnya penyandang disabilitas menjadi tim sukses karena tidak jelanya program-program yang ditawarkan oleh calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barata tahun 2013. Sehingga penyandang disabilitas merasa tidak ada yang perlu di dukung. Tetapi meskipun demikian ketua PPCI Kota Bandugn tidak melakukan golongan putih (golput) dan tetap memberikan hak suaranya, dan menghimbau sesama penyandang disabilitas di Kota Bandung untuk turut berpartisipasi dan mensukseskan pilgub Jabar tahun 2013.

Berbeda dengan dengan penyandang tuna rungu, salah satu penyandang tuna netra justru mengatakan dalam pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat tahun 2013 dirinya menjadi tim sukses salah satu pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub). Dapat dikatakan dirinya cukup dekat dengan calon gubernur tersebut karena sering berkunjung ke yayasan wyata guna. Yayasan wyata guna adalah yayasan khusus yang membina penyandang tuna netra. Dalam menjadi tim sukses mengajak para penyandang disabilitas khususnya tuna netra untuk memberikan dukungan. Tetapi meskipun terlibat menjadi tim sukses para informan lainnya belum pernah menjadi tim sukses.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas dalam menjadi tim sukses dapat dikatakan belum cukup baik. Dilihat dari kesepuluh informan hanya satu informan saja yang pernah menjadi tim

sukses, sementara Sembilan informan lainnya mengatakan belum pernah menjadi tim sukses karena tidak ada yang mewakili penyandang disabilitas.

Berdasarkan uraian diatas peerintah dalam hal ini calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat 2013 atau yang akan datang, sebaiknya mulai memperhatikan penyandang disabilitas di Kota Bandung karena jumlah penyandang disabilitas yang mempunyai hak suara di Kota Bandung cukup banyak. Dukungan atau suara dari penyandang disabilitas tentu akan membantu menambah perolehan suara. Tetapi hal ini harus diimbangi dengan bukti berupa realisasi program yang serius memperhatikan dan memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas tidak akan merasa terabaikan.

Ketiga, sub indikator dari mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah adalah demonstrasi. Demonstrasi adalah kegiatan protes yang dilakukan penyandang disabilitas Kota Bandung untuk menolak kebijakan ataupun menyampaikan pendapat kepada pemerintah apabila hak-hak penyandang disabilitas belum terpenuhi.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat diketahui bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak dan keinginan yang sama dalam memperjuangkan haknya. Meskipun mempunyai keterbatasan secara fisik tetapi hal tersebut tidak menghalangi penyandang disabilitas Kota Bandung untuk melakukan demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap hasil kerja pemerintah Kota Bandung mengenai masalah yang berhubungan dengan disabilitas .

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyandang tuna rungu mengatakan dirinya pernah melakukan demonstrasi. Alasan melakukan demonstrasi

karena dilator belakangi oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah, yang kurang memperhatikan penyandang disabilitas. Dalam melakukan unjuk rasa bersama-sama dengan sesama penyandang disabilitas lainnya mendatangi Kantor Walikota Bandung mapun melakukan demonstrasi di depan kantor gubernur Jawa Barat (Depan Gedung Sate).

Dalam melaksanakan demonstrasi menurut ketua persatuan penyandang cacat Indonesia (PPCI) Kota Bandung tidak pernah dengan kekerasan. Aksi demonstrasi biasanya hanya berorasi dengan membawa poster maupun spanduk yang berisi protes maupun keinginan penyandang disabilitas dalam memperoleh kehidupan yang layak. penyandang disabilitas dari persatuan penyandang cacat Indonesia (PPCI) Kota Bandung cukup sering melakukan demonstrasi. Dalam satu tahun persatuan penyandang cacat Indonesia (PPCI) Kota Bandung melakukan demonstrasi sebanyak dua kali. Pertama demonstrasi dilakukan setiap tanggal 3 Desember yang merupakan hari disabilitas Internasional. Demonstrasi pada hari disabilitas Internasional bukan untuk memprotes ataupun menyampaikan pendapat, tetapi dilakukan untuk mengingatkan pemerintah bahwa di Kota Bandung terdapat penyandang disabilitas. Karena pada tahun 2011 ada salah satu anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Jawa Barat yang tidak tahu ada peraturan daerah (perda) mengenai disabilitas. Selain memperingati hari disabilitas Internasional, demonstrasi juga dilakukan secara incidental karena penyandang disabilitas merasa belum diperhatikan.

Berdasrkan hasil wawancara dapat dikatakan sebenarnya penyandang disabilitas Kota Bandung tidak mau melakukan demonstrasi karena cukup membutuhkan tenaga, selain itu penyandang disabilitas juga memiliki keterbatasan menuju gedung kantor walikota maupun kantor gubernur Jawa Barat. Tetapi hal ini dilakukan para penyandang disabilitas Kota Bandung untuk memperjuangkan haknya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan uraian diatas partisipasi politik penyandang disabilitas Kota Bandung dalam melakukan demonstrasi dapat dikatakan cukup baik dilihat dari demonstrasi yang dilakukan dijalankan dengan tertib. Selain itu penyandang disabilitas juga cukup aktif dalam melakukan demonstrasi dilihat dari semua informan pernah melakukan demonstrasi untuk memprotes maupun menyampaikan pendapat yang berhubungan dengan masalah disabilitas.

4.4 Keterlibatan Penyandang Disabilitas Dalam Partai Politik

Menjadi anggota partai politik adalah pilihan yang diambil oleh penyandang disabilitas Kota Bandung untuk bergabung menjadi partisipan maupun simpatisan anggota suatu partai politik. Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama untuk bergabung menjadi anggota partai politik. Tetapi dalam partai politik yang menjadi koalisi dalam pemilihan gubernur Jawa Barat yaitu : Partai Demokrasi Indonesia Perjaungan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golongan Karya (Golkar), Gerindra, Hanura dan Partai Demokrat tidak ada anggotanya yang merupakan penyandang disabilitas.

Sub indikator pertama dari menjadi anggota partai politik yaitu penyandang disabilitas sebagai simpatisan. Simpatisan adalah keinginan paenyandang disabilitas untuk lebih memahami partai politik di Kota bandung. Keinginan ini muncul dari diri sendiri tanpa ada tekanan dan dorongan dari pihak lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyandang tuna rungu dapat dikatakan bahwa selama ini belum merasa menjadi simpatisan dari suatu partai politik. Karena partai politik hadir apabila menjelang pemilihan umum (pemilu), pemiliha kepala daerah (pilkada) dan pemilihan calon legislatif (caleg), sehingga penyandang disabilitas belum bersimpati terhadap partai politik yang ada di Kota Bandung.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan semua informan penyandang disabilitas tidak ada yang menempatkan diri sebagai simpatisan bagi partai politik di Kota Bandung. Hal ini disebabkan paradigm penyandang disabilitas terhadap partai politik yang hanya aktif menjelang pemilihan kepala daerah. Paradigma tersebut dapat dibenarkan karena selama penelitian dilapangan peneliti mengamati bahwa setelah pemilihan wali kota Bandung 24 juni lalu 8 dari 9 sekretarian partai politik DPC Kota Bandung sangat sepi bahkan tutup, kecuali partai keadilan sosial (PKS) yang sekretariatnya terlihat ada kegiatan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa partisipasi penyandang disabilitas sebagai simpatisan partai politik belum cukup baik. Dilihat dari sepuluh informan tidak ada satupun yang menmepatkan diri sebagai simpatisan partai politik dewan pimpinan cabang (DPC) Kota Bandung.

Sub Indikator kedua dari menjadi anggota partai politik yaitu penyandang disabilitas sebagai partisan. Partisan nerarti penyandang disabilitas terlibat menjadi anggota partai politik di Kota Bandung. Berdasarkan hasil observasi dilapangan tidak ada penyandang disabilitas yang menjadi anggota partai politik di Kota Bandung

Berdasrkan hasil wawancara dengan staf humas partai keadilan sejahtera (PKS) Kota Bandung dapat dikatakan bahwa partai keadilan sejahtera (PKS) Kota Bandung terbuka untuk semua masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Siapapun bisa menjadi anggota partai selama memilik kemampuan dan memenuhi persyarat serta telah melewati tahapan pendidikan dalam PKS.

Proses atau tahapan untuk menjadi anggota PKS meliputi : tahap mula, kedua tahap muda, ketiga tahap madya dan keempat tahap dewasa. Tahap mula yaitu calon anggota memenuhi persyaratan organisasi sperti : mengisi formulir. Tahap muda adalah tahap pendidikan bagi calon anggota, tahap ini wajib diikuti oleh seluruh calon anggota karena sebagai syarat untuk menjadi anggota . Tahap madya adalah tahapan dimana anggota akan menjadi pengurus partai, kemudian terakhir tahap madya adalah tahapan terakhir dimana anggota telah menjadi pengurus tetap.

Serangkaian proses tersebut harus diikuit oleh semua calon anggota untuk dapat menjadi anggota kemudian pengurus partai. Meskipun PKS terbuka untuk semua masyrakat termasuk penyandang disabilitas tetapi tidak ada anggota PKS yang merupakan penyandang disabilitas. Hal ini terjadi karena standar dalam proses/tahapan untuk menjadi anggota lebih membuka peluang bagi masyarakat normal yang tidak mempunyai keterbatasan fisik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua persatuan penyandang cacat Indonesia (PPCI) Kota Bandung dapat dikatakan bahwa faktor penyebab tidak adanya penyandang disabilitas yang menjadi anggota partai politik di Kota Bandung meliputi : Tidak adanya minat penyandang disabilitas yang ingin menjadi anggota partai politik di Kota Bandung karena tidak ada tawaran dari partai politik kepada penyandang disabilitas untuk bergabung menjadi anggota partai politik, paradigm penyandang disabilitas yang tidak percaya kepada partai politik.

Tidak adanya minat penyandang disabilitas untuk menjadi anggota partai politik di Kota Bandung karena paradigm penyandang disabilitas terhadapa dunia

politik dianggap rumit, selain itu penyandang disabilitas juga mersa tidak mendapatkan tawaran secara langsung dari partai politik. Karena partai politik lebih mengajak kepada artis, disbandingkan kepada penyandang disabilitas. Karena artis merupakan publik figur dan lebih mudah dikenal oleh masyarakat, berbeda dengan penyandang disabilitas karena masyarakatpun masih ragu terhadap kemampuan yang dimili penyandang disabilitas.

Selain itu struktur bangunan / gedung sekretariat partai juga belum bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil observasi dilapangan di sekretariat partai Partai Demokrasi Indonesia Perjaungan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golongan Karya (Golkar), Hanura dan Partai Demokrat Kota Bandung terdapat anak tangga. Dari selurruh partai tersebut hanya secretariat gerindra yang tidak terdapat anak tangga. Struktur bangunan yang memilik anak tangga sekilas memang tidak menjadi hambatan. Tetapi bagi penyandang disabilitas khususnya pengguna kursi roda dan tuna netra tentu akan menghambat aktivitas apabila bergabung menjadi anggota partai. Karena dalam menjalankan aktivitas di sekretariat partai pasti akan membutuhkan bantuan orang lain, dan ini membuat penyandang disabilitas menjadi tidak mandiri karena tergantung kepada orang lain.

Ketidak percayaan penyandang disabilitas kepada partai politik juga turut mempengaruhi partisipasi politik penyandang disabilitas dalam menjadi anggota partai. Partai politik yang seharusnya mampu mewakili aspirasi masyarakat dan

menjalankan fungsinya dengan baik di nilai penyandang disabilitas belum berjalan dengan baik karena keterbukaan kepada penyandang disabilitas tidak seperti kepada artis terkenal. Selai itu salah satu fungsi partai politik yaitu pendidikan politik belum dapat dirasakan oleh penyandang disabilitas di Kota Bandung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil ketua dewan pimpinan cabang (DPC) PDIP dapat diketahui bahwa PDIP sering berkunjung ke yayasan wyata guna untuk membina penyandang tuna netra, tetapi hanya tuna netra saja. Pernyataan tersebut juga berdasarkan hasil wawancara dengan rasikin dapat diketahui bahwa wakil ketua DPC PDIP Kota Bandung (Rike) sering berkunjung ke yayasan wyata guna untuk membina para tuna netra. Bentuk pembinaan yang dilakukan berupa dukungan moral bagi penyandang tuna netra.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan fungsi partai politik belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Karena dalam proses penelitian beberapa partai politik sangat tertutup dan sulit dihubungi sehingga harus beberapa kali mendatangi sekretariat karena telepon pun tidak dapat dihubungi. Selain itu di sekretariat juga terlihat sepi dan jarang terdapat kader yang melakukan kegiatan. Dari hasil observasi hanya satu partai politik yang sekretariatnya cukup aktif selebihnya harus mengikuti alur birokrasi partai yang rumit.

Berdasarkan hasil uraian diatas dapat diketahui bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas sebagai partisipan menjadi anggota partai politik belum cukup baik. Dilihat dari Sembilan partai peserta pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat yaitu : Partai Demokrasi Indonesia Perjaungan (PDIP), Partai Amanat Nasional

(PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golongan Karya (Golkar), Gerindra, Hanura dan Partai Demokrat DPC Kota Bandung tidak ada anggota/kadernya yang merupakan penyandang disabilitas. Penyebab tidak adanya penyandang disabilitas menjadi anggota partai politik di Kota Bandung bukan tidak ada kesempatan dari partai politik, hal ini terjadi karena penyandang disabilitas tidak mau terlibat di dalam dunia politik.